

BAB I

PENDAHULUAN

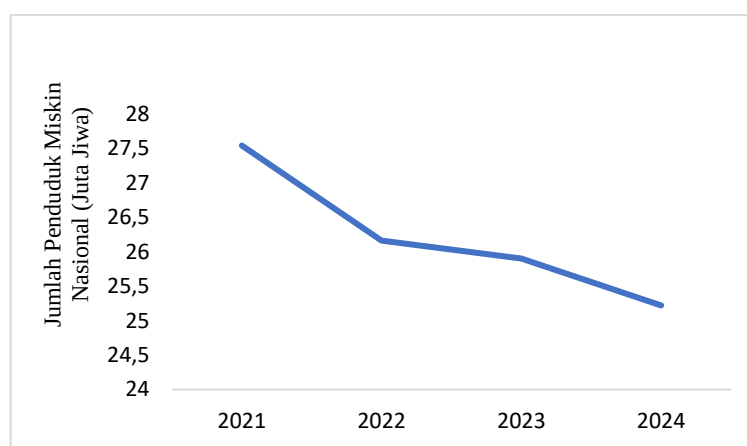
1.1 Latar Belakang Penelitian

Pelaksanaan pembangunan ekonomi secara prinsip memiliki sasaran utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mendorong kegiatan ekonomi dan memperbaiki berbagai aspek kehidupan sosial. Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah umumnya diukur melalui berbagai indikator makroekonomi yang menunjukkan kinerja ekonomi lokal. Salah satu indikator yang umum digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB menunjukkan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua entitas bisnis dalam kurun waktu tertentu dan berfungsi untuk mengamati perkembangan kegiatan ekonomi suatu wilayah secara berkala. (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024a).

Peningkatan laju ekonomi sangat diharapkan bisa membuka lebih banyak lapangan kerja dan menaikkan penghasilan masyarakat, yang pada akhirnya membawa kesejahteraan secara menyeluruh. Namun demikian, ekonomi yang terus maju belum tentu langsung menekan angka kemiskinan jika hasil pembangunannya tidak disalurkan secara merata. Maka dari itu, kualitas dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri menjadi faktor penentu berhasil tidaknya program penanggulangan kemiskinan (Suryahadi et al., 2012).

Keterkaitan antara laju perekonomian dengan tingkat kemiskinan sangat relevan untuk diamati dalam konteks pembangunan ekonomi di Indonesia, di mana

pengentasan kemiskinan masih menjadi salah satu fokus pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 (Kementerian PPN/Bappenas, 2025). Secara nasional, jumlah penduduk miskin menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun belakangan. Menurut informasi dari Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan per Maret 2024 tercatat sebesar 25,22 juta jiwa. Perkembangan jumlah penduduk miskin di Indonesia antara tahun 2021–2024 dapat dilihat pada Grafik 1.1 berikut.

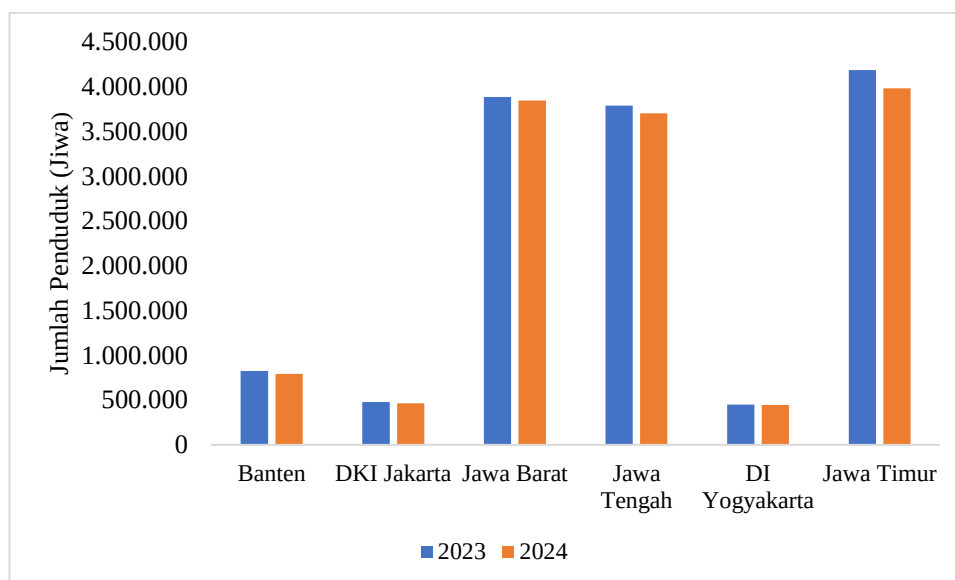


Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (2024)

Grafik 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2021–2024 (Maret)

Meskipun jumlah penduduk miskin secara nasional terus mengalami penurunan, hal tersebut belum sepenuhnya menggambarkan pemerataan kesejahteraan di semua wilayah. Perbedaan tingkat kemiskinan antar wilayah masih terlihat, termasuk di Pulau Jawa sebagai pusat kegiatan ekonomi negara. Walaupun kawasan ini merupakan kontributor terbesar bagi perekonomian nasional, tingkat kemiskinan antar provinsi di dalamnya masih menunjukkan perbedaan yang cukup

signifikan. Perbandingan penduduk miskin pada masing-masing provinsi di Jawa dapat dilihat secara jelas pada Grafik 1.2 di bawah ini (Badan Pusat Statistik, 2024).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Data Kemiskinan Maret 2023 dan Maret 2024.

Grafik 1.2 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Jawa Tahun 2023–2024

Merujuk pada grafik tersebut, Jawa Timur berada di urutan paling atas sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin paling banyak dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa (Badan Pusat Statistik, 2024). Berdasarkan Berita Resmi Statistik, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tercatat sebesar 4,188 juta jiwa pada Maret 2023, dan berada di angka 3,983 juta jiwa pada Maret 2024 (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2024a). Meskipun mengindikasikan adanya tren penurunan, perubahannya belum tergolong signifikan untuk mengentaskan status Jawa Timur sebagai penyumbang angka kemiskinan terbesar. Sebagai gambaran, dalam periode satu tahun tersebut, penurunan penduduk miskin di Jawa

Timur sebesar 205 ribu jiwa, sehingga masih menyisakan hampir 4 juta jiwa yang masih berada pada garis kemiskinan.

Fenomena ini menarik perhatian, mengingat Jawa Timur adalah salah satu daerah yang memberikan kontribusi signifikan bagi PDRB nasional. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) daerah ini menembus angka Rp3.168,29 triliun, dengan laju pertumbuhan ekonomi mencapai 4,93 persen (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2024b). Besarnya nilai PDRB tersebut membuktikan bahwa aktivitas ekonomi di Jawa Timur relatif tinggi. Meskipun demikian, penurunan jumlah penduduk miskin belum menunjukkan perubahan yang signifikan.

Tren penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur yang mulai melambat belakangan ini terjadi karena persentasenya sudah mendekati kisaran 10 persen yang sering dikategorikan sebagai *hard core poverty*. Kondisi ini menunjukkan bahwa kelompok miskin yang tersisa umumnya berada pada kondisi yang lebih sulit untuk keluar dari kemiskinan, seperti tingkat pendidikan yang rendah, akses pekerjaan yang terbatas, serta keterbatasan dalam layanan kesehatan dan perlindungan sosial. Kondisi tersebut menyebabkan upaya penurunan kemiskinan menjadi lebih kompleks dibandingkan sebelumnya (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2024c).

Fenomena ketimpangan kesejahteraan tidak hanya terjadi pada tingkat provinsi, melainkan terjadi juga antar kabupaten/kota di Jawa Timur. Sebagian wilayah tercatat memiliki tingkat kemiskinan yang relatif rendah, sedangkan beberapa wilayah lainnya masih berada pada tingkat yang lebih tinggi (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2024c). Perbedaan ini dapat berkaitan dengan

kemampuan fiskal dan efektivitas pengelolaan anggaran pemerintah masing-masing daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah melalui mekanisme desentralisasi fiskal menjadi faktor penting yang perlu dianalisis lebih lanjut.

Desentralisasi fiskal merupakan kebijakan yang memberikan hak bagi pemerintah daerah untuk mengurus keuangannya sendiri. Hal ini bertujuan agar proses pelaksanaan pembangunan bisa berjalan lebih maksimal dan sesuai dengan kondisi di wilayahnya masing-masing. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah memiliki keleluasaan yang lebih luas untuk menetapkan target pembangunan mana yang harus didahulukan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (World Bank, 2020). Di Indonesia, pelaksanaan desentralisasi fiskal diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan desentralisasi fiskal masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kemandirian dan efektivitas pengelolaan anggaran. Berdasarkan kajian empiris terhadap postur anggaran daerah di Indonesia yang dipublikasikan dalam laporan *Public Expenditure Review*, terungkap bahwa banyak daerah yang masih bergantung pada alokasi dana transfer dari pusat. Lebih lanjut, laporan tersebut menekankan bahwa tantangan utama saat ini adalah kualitas belanja daerah, di mana anggaran yang di transfer belum sepenuhnya dialokasikan secara optimal dan efisien dalam mendorong

pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata (World Bank, 2020).

Selain melalui pengelolaan desentralisasi fiskal secara umum, upaya pengentasan kemiskinan di daerah juga dipengaruhi oleh kebijakan alokasi belanja yang menyentuh langsung masyarakat miskin dan rentan. Salah satu instrumen fiskal tersebut adalah belanja bantuan sosial. Penyaluran bantuan sosial ini dibutuhkan untuk menjaga daya beli sekaligus mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin, sehingga diharapkan mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara langsung.

Pelaksanaan bantuan sosial di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Ketepatan data penerima, transparansi proses penyaluran, serta ketepatan sasaran menjadi tantangan utama yang dapat mengurangi efektivitas program. Ketidaktepatan penyaluran bantuan dapat menimbulkan *inclusion error* maupun *exclusion error* sehingga manfaat program tidak sepenuhnya diterima oleh kelompok yang berhak (Ariansyah et al., 2025). Akibatnya, besarnya alokasi belanja bantuan sosial belum tentu menurunkan tingkat kemiskinan apabila tidak disertai dengan ketepatan sasaran. Selain itu, hasil penelitian yang sudah ada masih memberikan kesimpulan yang berbeda-beda terkait efektivitas belanja bantuan sosial (Sari & Marissa, 2023).

Hasil penelitian terdahulu mengenai desentralisasi fiskal dan belanja bantuan sosial menunjukkan adanya inkonsistensi temuan. Beberapa penelitian menemukan bahwa desentralisasi fiskal berkontribusi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin karena otonomi daerah memberi ruang bagi pemerintah daerah

untuk mengatur dananya agar lebih relevan dengan situasi maupun keperluan masyarakat daerah (Pasholihah & Anwar, 2023). Belanja bantuan sosial juga dilaporkan efektif dalam mengurangi beban hidup penduduk miskin (Rossa & Ananda, 2024). Namun, temuan lain menunjukkan hasil yang berbeda. Desentralisasi fiskal tidak selalu diikuti oleh perbaikan kesejahteraan masyarakat (Marya et al., 2024). Sementara itu, belanja bantuan sosial dinilai belum mampu menurunkan kemiskinan akibat kendala dalam pelaksanaan dan penyalurannya (Triyulianto et al., 2024).

Perbedaan hasil penelitian mengenai desentralisasi fiskal dan belanja bantuan sosial tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara desentralisasi fiskal, belanja bantuan sosial, dan kemiskinan masih memerlukan pengujian lebih lanjut pada konteks wilayah dan periode yang berbeda. Penelitian ini mengacu pada penelitian terkait desentralisasi fiskal (Pasholihah & Anwar, 2023) serta penelitian mengenai belanja bantuan sosial (Rossa & Ananda, 2024). Hal utama yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ada pada kombinasi variabel serta periode waktunya. Jika penelitian terdahulu meneliti isu ini secara terpisah dengan periode yang data sebelumnya, penelitian ini mengkaji kedua variabel tersebut secara bersama-sama pada lokasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur menggunakan data terbaru, yakni tahun 2023–2024.

Berdasarkan kondisi *hard core poverty* di Jawa Timur serta adanya perbedaan temuan pada penelitian sebelumnya, diperlukan pengujian empiris lebih lanjut mengenai pengaruh desentralisasi fiskal beserta penyaluran belanja bantuan sosial dalam menekan angka kemiskinan. Berdasarkan alasan tersebut, penulis

bermaksud menyusun kajian dengan judul **“Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023–2024”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, perlu dibuat batasan masalah agar pembahasan lebih fokus. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Desentralisasi Fiskal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023–2024.
2. Bagaimana Belanja Bantuan Sosial pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023–2024.
3. Bagaimana Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023–2024.
4. Seberapa besar pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023–2024.
5. Seberapa besar pengaruh Belanja Bantuan Sosial terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023–2024.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Desentralisasi Fiskal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023–2024.
2. Untuk mengetahui realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023–2024.
3. Untuk mengetahui tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023–2024.
4. Untuk mengetahui pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023–2024.
5. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Bantuan Sosial terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023–2024.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan informasi yang dapat diandalkan serta memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, bagi penulis, instansi terkait, dan pihak lain yang berkepentingan.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Mampu memberikan bukti empiris terkait pengaruh desentralisasi fiskal dan belanja bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023–2024.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan literatur bidang akuntansi, khususnya untuk peminatan Akuntansi Sektor Publik dan Keuangan Daerah yang berfokus pada pengelolaan anggaran pemerintah daerah.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk menjelaskan ketidakkonsistenan (*research gap*) hasil penelitian terdahulu, di mana terdapat perbedaan temuan mengenai desentralisasi fiskal dan bantuan sosial terhadap kemiskinan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Selain ditujukan untuk memenuhi syarat penyusunan Skripsi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan, penelitian ini diharapkan bisa menjadi wadah untuk melatih pola pikir ilmiah melalui penerapan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan serta penerapannya pada data dan objek penelitian.

b. Bagi Instansi

Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam merumuskan kebijakan anggaran, serta menjadi referensi dalam meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan agar lebih tepat sasaran.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai tambahan bahan referensi atau bahan perbandingan untuk pihak-pihak yang ingin meneliti topik serupa serta membantu memperluas wawasan akademis.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan batasan wilayah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan data tahun 2023–2024. Adapun waktu penelitian dilakukan pada Mei 2026 sampai dengan selesai.